

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan *Human Development Report* (HDR). Munculnya gagasan tentang pembangunan manusia yang dikemukakan oleh UNDP tersebut bukan hanya menempatkan manusia sebagai input dari pembangunan tetapi juga menjadi tujuan akhir pembangunan, yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk produktif sehingga dapat memiliki umur panjang dan hidup sehat, menguasai pengetahuan, dan memenuhi standar hidup yang layak. *Human Development Report* juga memberikan rekomendasi pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai indeks pembangunan manusia (IPM).¹

Indeks pembangunan manusia merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah

¹ Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia*, BPS 2020

negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup.²

IPM diperkenalkan oleh salah satu lembaga dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). UNDP mencoba memeringkat semua negara dari skala 0 (terendah) sampai 1 (tertinggi) dalam hal pembangunan manusia tersebut. Sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia diantaranya:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya upaya meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.

² Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, *Indeks Pembangunan Manusia*, BPS 2015

4. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar, yaitu produktifitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.
 - a. Konsep dan pengukuran pembangunan manusia

Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang baik atau positif dan perubahan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan tingkat kesejahteraan. Hal ini harus terjadi pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, fokus utama pembangunan manusia itu adalah pada manusianya dan kesejahteraannya.

Pembangunan manusia menekankan pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat. Tidak hanya itu, pembangunan manusia juga berbicara tentang perluasan kapabilitas individu dan komunitas untuk memperluas jangkauan pilihan mereka dalam upaya memenuhi aspirasinya.

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator komposit tunggal yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.

Pembangunan manusia dalam agenda nasional yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan global yang disepakati negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, hingga tahun 2030. Terdapat tujuh belas dalam program TPB yaitu:

- a) Tanpa kemiskinan
- b) Tanpa kelaparan
- c) Kehidupan sehat dan sejahtera
- d) Pendidikan berkualitas
- e) Kesetaraan gender
- f) Air bersih dan sanitasi layak

- g) Energi bersih dan terjangkau
- h) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
- i) Industri, inovasi, dan infrastruktur
- j) Berkurangnya kesenjangan
- k) Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
- l) Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab
- m) Penanganan perubahan iklim
- n) Ekosistem lautan
- o) Ekosistem daratan
- p) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh
- q) Kemitraan untuk mencapai tujuan

Komitmen pemerintah Indonesia dalam mengusung TPB adalah salah satunya menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Target-target dalam TPB mencakup; program kegiatan dan indikator yang dapat dievaluasi, serta mengidentifikasi pembiayaan. Seluruh pemangku kepentingan seperti ormas, filantropi, akademisi pelaku usaha, dan kepentingan lainnya turut terlibat dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi TPB sesuai spesifikasinya.

Agenda TPB diusung pemerintah dalam nawacita pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla periode 2014-2019. Secara khusus, isu mengenai pembangunan manusia menjadi salah satu poin penting agenda pemerintah yang terwujud dalam beberapa program seperti pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, dan Program Indonesia Kerja.

Pemerintah menargetkan pembangunan daerah tertinggal semakin maju dengan meningkatkan IPM pada daerah tertinggal sehingga ketimpangan IPM semakin berkurang dan pemerataan kesejahteraan manusia terus diwujudkan.

Sumber daya manusia yang berkualitas diperoleh dari meningkatnya akses pendidikan berkualitas pada semua jenjang pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, meningkatnya kompetensi siswa di bidang literasi dan sains, meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan gizi masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengembangan jaminan kesehatan.

b. Manfaat dari IPM:

Indeks pembangunan manusia menjadi salah satu indikator penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Setiap indikator komponen penghitungan IPM dapat dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).³

Manfaat lain dari IPM adalah sebagai salah satu indikator target pembangunan dan salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja utama Dana Insentif Daerah (DID) dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai salah satu indikator dalam pengalokasian DID.

B. Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk domestik regional bruto menurut badan pusat statistik adalah sebagai jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu wilayah domestik. Atau merupakan jumlah hasil seluruh nilai

³ BPS., *Indeks Pembangunan Manusia*, (Jakarta: BPS, 2020), h. 10.

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah.⁴ PDRB merupakan salah satu indikator penting di suatu wilayah dan dalam periode tertentu (setahun) dalam pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu daerah atau suatu negara, dalam penyajian PDRB ada dua cara, yaitu atas harga berlaku dan atas harga konstan.

- a) PDRB atas harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi dan struktur daerah ekonomi suatu daerah.
- b) PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dapat dihitung menggunakan harga barang yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.

Untuk menghitung angka-angka PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu:

1. Pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh

⁴ BPS, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha (Jakarta: BPS, 2015) h. 8

berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

2. Pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).
3. Pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumahtangga dan lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto.

Secara konsep tiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama.

2. Kegunaan Data PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini adalah:

- a. PDRB atas harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah. Nilai pdrb yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

- b. PDRB atas harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
- c. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.
- d. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- e. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah.

3. Pertumbuhan Ekonomi dalam Ekonomi Islam

Pertumbuhan ekonomi ialah upaya peningkatan kapasitas yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk mencapai penambahan output.

Pertumbuhan ekonomi menurut Sukirno yang diungkapkan oleh Himawan, "pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu yang menyebabkan pendapatan nasional riil

berubah. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.⁵

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah digunakan suatu indikator yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi diartikan juga sebagai kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar dari jumlah penduduk atau lebih kecil.

Banyak ahli ekonomi dan fiqih yang memberikan perhatian terhadap persoalan pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan hanya aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi materi dan spiritual manusia.⁶

Dalam kajian ekonomi islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para

⁵ Himawan Yudistira Dama, Agnes I ch Lopian dan Jacline I. Sumual, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di kota Manado", Jurnal Ekonomi Pembangunan, h.3

⁶ Moch. Zainuddin, "Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal STAIN Kediri, h. 4

ahli dalam wacana pemikiran ekonomi islam klasik. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Swt surah Hud ayat 61:

وَالِىٰ تَمُوذَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلٰهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعِفُّوهُ
ثُمَّ تَوُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

“Dan kepada kaum Samud (kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “wahai kaumku! Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain dia. Dia telah menciptakanmu dari Bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohon ampunlah kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).

C. Ketimpangan Distribusi Pendapatan

1. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris *ditribution* yang berarti penyaluran atau pembagian. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Dalam ekonomi konvensional, distribusi diartikan dengan klasifikasi pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, bunga, modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha-pengusaha. Distribusi adalah proses

penentuan harga yang dipandang dari sudut penerimaan pendapatan dan bukanlah dari sudut pembayar biaya-biaya.⁷

Penyaluran barang dan jasa mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi kepada konsumen dan pemakainya. Tanpa distribusi, barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen tidak bisa disalurkan, sehingga kegiatan distribusi dan konsumsi tidak lancar. Dan distribusi juga mempunyai peran signifikan dalam perputaran roda perekonomian masyarakat atau negara.

Pengertian distribusi menurut Afzalur Rahman seperti yang dikutip oleh Idri, “ distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu-individu, masyarakat maupun negara”.⁸

Distribusi dalam ekonomi islam mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan serta bagaimana mendapatkan, menggunakan hingga memilikinya. Islam tidak mengizinkan distribusi barang atau jasa yang dilarang seperti distribusi daging babi, khamar,

⁷ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2015), h.128

⁸ Idri, *Hadis Ekonomi....*, h. 130

narkoba, bangkai, hasil perjudian, riba dan lain sebagainya. Contoh distribusi barang dalam ekonomi islam salah satunya ialah zakat, jika tidak dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya seperti orang-orang fakir, miskin, gharim, ibnu sabil, mualaf dan lain sebagainya. Penetapan ini bertujuan agar yang menerima zakat itu hanyalah orang-orang yang berhak saja dan agar tercipta pendistribusian zakat yang adil.

2. Prinsip-Prinsip Ditribusi Dalam Ekonomi Islam

Sistem ekonomi islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi, yaitu kebebasan dan keadilan. Disini kebebasan adalah melakukan aktifitas ekonomi yang berada dalam bingkai etika dan norma-norma islam. Islam menegaskan bahwa dalam harta orang-orang kaya terdapat hak yang harus di distribusikan kepada orang-orang miskin, sehingga harta itu tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya, seperti firman Allah dalam surah Al hasr ayat 7:⁹

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ

⁹ Idri, *Hadis Ekonomi*....., h. 51

عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Harta rampasan fai’ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Dalam mendistribusikan harta harus memperhatikan apakah pendistribusian tersebut itu merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya sebagian saja. Harta tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya sehingga orang-orang miskin hidup dalam kekurangan dan penderitaan. Islam mewajibkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta (mal) dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi dikalangan masyarakat sehingga muncul ketenangan dan kebahagiaan bersama, terhindar dari segala bentuk kejahatan, kedengkian dan kezaliman.

3. Pengertian Pendapatan

Pendapatan menurut Samuelson yang di kutip oleh Iskandar berarti penerimaan total atau kas yang diperoleh oleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari penghasilan tenaga kerja,

penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga, dan dividen), dan tunjangan transfer pemerintah. secara umum pendapatan dapat digolongkan menjadi 3 golongan yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Pendapatan dari gaji dan upah

Suatu imbalan yang diperoleh seseorang setelah melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain, perusahaan swasta atau pemerintah.

2. Pendapatan dari kekayaan

Pendapatan dari usaha sendiri, merupakan nilai total produksi dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan baik dalam bentuk uang atau lainnya, tenaga kerja keluarga dan nilai sewa kapital untuk sendiri tidak diperhitungkan.

3. Pendapatan dari sumber lain

Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja antara lain dari bantuan pemerintah, asuransi pengangguran, menyewa aset, bunga bank serta sumbangan dalam bentuk lain.

4. Pengertian Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan seperti yang dikutip oleh Vera Lutfia adalah suatu ukuran yang digunakan untuk melihat beberapa pembagian dari pendapatan

¹⁰ Iskandar, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin di kota Langsa", Jurnal Ekonomi, h. 3

nasional yang diterima masyarakat.¹¹ Manfaat dari hasil penghitungan distribusi pendapatan ini adalah untuk mengetahui berapa persen pendapatan nasional yang akan didapatkan oleh penduduk. Dari data tersebut dapat diketahui apakah pendapatan nasional telah didistribusikan kepada seluruh penduduk di negara tersebut secara merata atau tidak.

Ketimpangan distribusi pendapatan menurut Musfidar yang di kutip oleh Anggiat dan Zulgani merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan. Hal tersebut tidak dapat dihindari karena adanya efek perembesan kebawah (*trickle down effect*) dari output secara sempurna. Hasil output nasiona hanya dinikmati oleh segelintir golongan minoritas dengan tujuan tertentu.¹²

¹¹ Vera Lutfia Annisa, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia tahun 2019” (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten, 2020), h. 17.

¹² Anggiat Mugabe Damanik. Zulgani dan Rosmeli, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi”, Jurnal Ekonomi, (2018) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, h. 16

5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ketimpangan dalam kamus bahasa Indonesia berarti hal yang tidak sebagaimana semestinya atau ketidakadilan. Ketimpangan atau kesenjangan merupakan salah satu persoalan dalam paradigma pembangunan ekonomi negara khususnya Indonesia sebagai negara berkembang. Munculnya kesenjangan ekonomi menimbulkan banyak masalah lain yang bermunculan, seperti bertambahnya penduduk miskin, pengangguran meningkat, tingkat kejahatan meningkat, menurunnya kualitas penduduk (SDM), dan daya beli masyarakat juga menurun.

Menurut Adelman dan Morris sebagaimana yang dikutip oleh Vera Lutfia ada delapan yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, yaitu:¹³

- a. Pertambahan penduduk yang tinggi mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita
- b. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang
- c. Ketidakmertaan atau ketimpangan pembangunan antar daerah

¹³ Vera lutfia, *Analisis Pengaruh.....*h. 17

- d. Investasi yang banyak dalam proyek-proyek pada modal (*capital intensive*) sehingga presentase pendapatan modal dari harta tambah besar dibandingkan dengan resentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah.
- e. Rendahnya mobilitas sosial
- f. Pelaksanaan kebijaksanaan industry impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang-barang hasil untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis
- g. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat ketidaksetiaan permintaan negara-negara ekspor negara sedang berkembang.
- h. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

D. Operasional variabel penelitian

Operasional variabel adalah variabel yang akan dibahas secara operasional, praktik, dan secara nyata dalam ruang lingkup obyek yang sedang diteliti.

Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
1.	Indeks Pembangunan Manusia (X_1)	Indeks pembangunan manusia menurut BPS dalam Statistik Indonesia (2020) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia.	Angka Harapan Hidup	Rasio
2.	Produk Domestik Regional Bruto (X_2)	Produk domestik regional bruto menurut Badan Pusat Statistik adalah sebagai jumlah nilai tambah bruto	Atas Harga Konstan	Rasio

		atau jumlah hasil seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah		
3.	Ketimpangan distribusi pendapatan (Y)	Ketimpangan distribusi pendapatan adalah tidak meratanya pembagian dari pendapatan nasional yang diterima masyarakat.	Indeks Gini	asio

E. Hubungan Antar Variabel

1. Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Distribusi Pendapatan

Indeks pembangunan manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil

pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Nilai IPM yang tinggi mengindikasikan pembangunan manusia yang baik, salah satunya pendidikan, dimana pendidikan formal yang semakin tinggi akan meningkatkan produktifitas dan pendapatan.¹⁴ Maka dengan demikian, IPM dan distribusi pendapatan saling berhubungan.

2. Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ketahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi atau pertumbuhan dapat tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada

¹⁴ Fergiawan Avriandaru, "Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia, Pendidikan, Populasi Penduduk, dan Pengangguran Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2015", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, h. 29

tahun berikutnya¹⁵. Maka dapat dikatakan pdrb dan distribusi pendapatan saling berhubungan.

F. Perumusan Hipotesis

Sebelum melakukan hipotesis ada beberapa rumusan hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_0 : Indeks pembangunan manusia dan produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di indonesia

$H_{1,1}$: Indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di indonesia

$H_{1,2}$: Produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di indonesia

$H_{1,3}$: Indeks pembangunan manusia dan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di indonesia

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan,

¹⁵ Del Anggina dan Wahyu Dwi Artaningtyas, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2014", Jurnal Ekonomi, h. 20.

belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.¹⁶ Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2020
2. Diduga produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2020
3. Diduga indeks pembangunan manusia dan produk domestik regional bruto berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia 2020

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), cetakan ke 26, h. 63.